

RENCANA AKSI

2020



**Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Lingkungan
dan Kehutanan**

RENCANA AKSI KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur;
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 21 September 2020. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah membuat Perjanjian Kinerja dengan para Pejabat Eselon II di di Lingkup Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, maka kami menyusun Rencana Aksi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Rencana aksi tersebut menghubungkan antara rencana *outcome* yang ada dalam perjanjian kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Dengan demikiran, diharapkan rencana aksi kinerja tahun 2020 menjadi acuan bagi Pejabat Eselon II di Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dalam menjalankann aktivitasnya.

Jakarta, September 2020

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan



Nani Hendiarti

DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama/Kegiatan	Target Tahunan	Anggaran	Waktu Capaian				Keterangan	
						TW I	TW II	TW III	TW IV		
Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan											
SS.1	Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan		IKU.1 Capaian luas kawasan perhutanan sosial - Pemberian akses kelola kawasan hutan kepada	125.000 Hektar						v	
SS.2	Terciptanya keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang		IKU.2 Persentase capaian target luasan perhutanan sosial Tahapan Kegiatan : (8 Kegiatan) 1. Rapat Koordinasi Progres Capaian Perhutanan Sosial 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Revitalisasi Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) dan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) 3. Penyusunan Roadmap/ Rencana Aksi Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 4. Penyusunan SK Revitalisasi Pokja Nasional Perhutanan Sosial 5. Rapat Koordinasi antara Pusat, Daerah, dan BPPSKL 6. Kunjungan Lapangan ke KUPS 7. Rapat Koordinasi Finalisasi Draf SK Pokja Nasional 8. Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen Roadmap/	3%						v	Persentase capaian pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat pada tahun 2020 dibandingkan dengan target RPJMN di tahun 2024 sebesar 4 juta Ha
SS.3	Tersedianya pengendalian kebijakan bidang Penataan Kawasan Hutan		IKU.3 Persentase pengendalian kebijakan bidang Penataan Kawasan Hutan yang diajukan ke Deputi Tahapan Kegiatan : (8 Kegiatan) 1. Rapat Koordinasi Progres Capaian Perhutanan Sosial 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Revitalisasi Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) dan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) 3. Penyusunan Roadmap/ Rencana Aksi Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 4. Penyusunan SK Revitalisasi Pokja Nasional Perhutanan Sosial 5. Rapat Koordinasi antara Pusat, Daerah, dan BPPSKL 6. Kunjungan Lapangan ke KUPS 7. Rapat Koordinasi Finalisasi Draf SK Pokja Nasional 8. Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen Roadmap/	100%	272.000.000					v	Luas kawasan yang dikelola oleh masyarakat sebesar 125.000 Hektar

SS.4	Tersedianya pengendalian kebijakan bidang Pengelolaan Kawasan Gambut	<p>IKU.4 Persentase pengendalian kebijakan bidang Pengelolaan Kawasan Gambut yang diajukan ke Deputi</p> <p>Tahapan Kegiatan : (8 Kegiatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakor Pembahasan Hasil KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah 2. Rapat Koordinasi Progres Pengelolaan dan Restorasi Gambut 3. Konsultasi Publik KLHS Cepat 4. Rapat Koordinasi penyusunan peta KHG 5. Rapat Koordinasi terkait Revisi Perpres BRG 6. Sosialisasi RPPEG provinsi dan kabupaten/ kota 7. Kunjungan lapangan dan monev 8. Rakor Capaian progres Restorasi Gambut 	100%	290.000.000				v	Luas ekosistem gambut yang telah dilakukan pembasahan (rewetting) sebesar 122.000 Ha
SS.5	Tersedianya pengendalian kebijakan bidang Optimalisasi Tata Lingkungan	<p>IKU.5 Pengendalian kebijakan bidang Optimalisasi Tata Lingkungan yang diajukan ke Deputi</p> <p>Tahapan Kegiatan : (7 Kegiatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rakor Progres Capaian Pelepasan Kawasan Hutan melalui TORA 2. Penetapan Rencana Kerja Penyelesaian Target TORA 3. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Penyelesaian Prioritas 1 dan Hasil Rakor Tim Percepatan PPTKH Tahap III 4. Rapat Koordinasi untuk membahas hasil pengukuran tata batas antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN 5. Rapat Koordinasi dengan Pemda 6. Kunjungan Lapangan dan Monev 7. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Penerima sertifikat TORA 	100%	398.000.000				v	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebesar 46.500 Ha

Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan									
SS.1	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	IKU.1 Jumlah nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu Tahapan Kegiatan : 1. Rapat peningkatan nilai produk kayu 2. Monitoring dan Evaluasi ekspor produk kehutanan	80%					√	Jumlah nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu
SS.2	Meningkatnya pemanfaatan produk terutama dari hutan produksi	IKU.2 Persentase target jumlah Produksi hasil hutan kayu Tahapan Kegiatan : 1. Penerbitan revisi Permendag tentang ketentuan ekspor 2. Penerbitan revisi PermenLHK tentang teknis pelaksanaan SVLK 3. Penyusunan SKB Menteri dalam pengintegrasian sistem informasi hulu-hilir 4. Pembuatan Dashboard Informasi dan Peredaran Produk Kehutanan dengan Tim Pokja 5. Monitoring ekspor produk kehutanan	80%					√	Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu
SS.3	Meningkatnya Usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan	IKU.3 Persentase Target Pengembangan Unit Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi pengembangan jasa lingkungan di hutan produksi 2. Kunjungan lapangan ke unit pemanfaatan jasa lingkungan di hutan produksi	80%					√	Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi
SS.4	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan	IKU.4 Persentase target Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi Tahapan Kegiatan : 1. Rapat pelaksanaan regulasi (RPerpres) percepatan pemulihan hutan pasca aktivitas tambang	80%					√	Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi
SS.5	Persentase penyelesaian tugas lainnya	IKU.5 Persentase penyelesaian tugas lainnya Tahapan Kegiatan :	100%					√	

SS.6	Efektivitas rumusan kebijakan bidang Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	IKU.6.1 Persentase pengendalian kebijakan bidang Pengembangan dan Pemasaran Produk Hutan Produksi	100%	279.117.000				√	Bidang Optimalisasi Tata Lingkungan yang diajukan ke Deputi
		Tahapan Kegiatan : 1. Rapat revisi Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan 2. Rapat revisi PermenLHK terkait teknis pelaksanaan SVLK 3. Rapat pengembangan klaster industri kehutanan 4. Rapat restrukturisasi industri plywood 5. Rapat kebijakan green public procurement 6. Rapat relaksasi kebijakan fiskal pada industri kehutanan dan impor mesin plywood tidak baru 7. Rapat pokja sistem informasi hulu-hilir							
		IKU.6.2 Persentase pengendalian kebijakan bidang Pengembangan Jasa Lingkungan							238.065.000
		IKU.6.3 Persentase pengendalian kebijakan bidang Pengendalian Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan		242.818.000				√	Bidang Pengendalian Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan
		Tahapan Kegiatan : 1. Rapat penyusunan regulasi (RPerpres) percepatan pemulihan hutan pasca aktivitas tambang 2. Rapat pengembangan wood pellet dengan memanfaatkan limbah industri kehutanan 3. Webinar rehabilitasi lahan bekas tambang 4. Rapat pemanfaatan teknologi Huawei dalam peningkatan pemeliharaan hutan 5. Kunjungan lapangan dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pelestarian hutan							

Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam									
SS.1	Meningkatnya kualitas sumber daya air	IKU.1 Nilai peningkatan kualitas sumber daya air Tahapan Kegiatan : 1. Rapat koordinasi Percepatan Penyelesaian Rperpres Danau Prioritas	55,1					√	Penyelamatan danau prioritas nasional
SS.2	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya hayati	IKU.2 Nilai efektifitas pengelolaan konservasi sumber daya hayati Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan Inpres Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati	70%					√	Peningkatan populasi satwa prioritas di kawasan konservasi
SS.3	Terwujudnya penurunan pencemaran air	IKU.3 Persentase penurunan pencemaran air Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan PAK untuk proses harmonisasi usulan dengan Kemenkum HAM 2. Rapat koordinasi Teknis dengan Bappenas, KLHK dan Ekon terkait rencana Rakornas Danau Prioritas 3. Monitoring dan Evaluasi Danau Prioritas dengan K/L terkait 4. Monitoring dan evaluasi Pengendalian pencemaran kualitas air untuk meningkatkan IKA	5%					√	penyusunan kebijakan penyelamatan danau prioritas nasional
SS.4	Terwujudnya perbaikan kualitas tata air	IKU.4 Luasan lahan kritis yang direhabilitasi di DAS Prioritas Tahapan Kegiatan : 1. Studi Banding dan analisis pakar terhadap indikator kesehatan DAS 2. Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Draf Indikator Kesehatan DAS 3. Rapat koordinasi pembahasan kerjasama dengan Astrazaneca untuk penanaman 10 juta pohon di TN Tanjung Puting dan DAS Citarum	150.000 Ha					√	Penyusunan draft pengukuran kinerja daerah aliran sungai
SS.5	Peningkatan efektifitas pengelolaan Kawasan konservasi	IKU.5 Persentase peningkatan populasi satwa prioritas di kawasan konservasi Tahapan Kegiatan : 1. Pembentukan Pokja Konservasi Keanekaragaman Hayati 2. Rapat Pokja Konservasi Keanekaragaman Hayati terkait penyusunan draf kebijakan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati	2%					√	Penyusunan draft kebijakan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati

SS.6	Efektifitas rumusan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan Konservasi SDA	<p>IKU.6.1 Persentase Rumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan rancangan kebijakan</p> <p>Tahapan Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kunjungan Lapangan pada DAS Kritis 2. Rapat penyusunan indikator Kesehatan DAS 3. Proses Penandatanganan PKS antara TN Tanjung Puting dengan Friend of National Park 4. Rapat dan kunjungan koordinasi pengembangan FE Sumut 	100%	273.192.000				√	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
		<p>IKU.6.2 Persentase Rumusan kebijakan di bidang Bidang Restorasi Kualitas Sumber Daya Air</p> <p>Tahapan Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pembahasan Review Rencana Aksi Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019 - 2025 2. Penyusunan R.Perpres Penyelamatan Danau Prioritas 3. Rapat Penyelesaian peraturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2019 (4 Peraturan Pemerintah); 4. Rapat Revisi Perpres Dewan Sumber Daya Air dan Keppres Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air; 5. Rapat Penyelesaian Perpres Kebijakan Nasional Sumber Daya Air; 6. Rapat Penyelesaian permasalahan pendayagunaan 		457.636.000				√	Bidang Bidang Restorasi Kualitas Sumber Daya Air
		<p>IKU.6.3 Rumusan kebijakan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem</p> <p>Tahapan Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Penyusunan Inpres Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati 2. Rapat Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berstatus Internasional 3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lembaga konservasi khususnya dukungan pendanaan untuk pakan dan pemeliharaan satwa pada masa pandemi covid-19 4. Rapat dan Kunjungan koordinasi pengembangan KHDTK Pollung 		479.172.000				√	Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah									
SS.1	Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	IKU.1 Tingkat Efektifitas penanganan sampah Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Formulasi metode monitoring baseline sampah laut dan capaian pengurangan sampah laut 2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan ISWM 3. Kunjungan Lapangan Kegiatan ISWM	50.48%					√	Pengurangan jumlah timbulan sampah dan peningkatan jumlah sampah yang ditangani
SS.2	Terwujudnya penanganan sampah yang sesuai dengan regulasi	IKU.2 Penanganan sampah laut Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Pembuatan Juknis Penanganan Sampah di Destinasi Wisata 2. Rapat Finalisasi Penetapan Juknis Penanganan Sampah di Destinasi Wisata 3. Kunjungan Lapangan sebagai penajam Juknis Penanganan Sampah di Destinasi Wisata	10%					√	Peningkatan jumlah sampah laut yang ditangani
SS.3	Terwujudnya penanganan limbah yang sesuai dengan Regulasi	IKU.3 Tingkat penanganan pengelolaan limbah medis B3 Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Pembangunan Incenerator Limbah B3 Medis 2. Kunjungan Lapangan ke 5 lokasi pembangunan Incenerator	75%					√	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Incenerator Limbah Medis B3 di 5 lokasi wilayah - Pembangunan Incenerator Limbah Medis 'B3 di 5 lokasi wilayah
SS.4	Terwujudnya efektifitas Penanganan kerusakan lingkungan	IKU.4 Jumlah penanganan kerusakan lingkungan Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Penanganan Emas Tanpa Ijin (PETI) di 3 Lokasi 2. Kunjungan Lapangan Penanganan Emas Tanpa Ijin (PETI) di 3 Lokasi	3 Lokasi					√	- Penyusunan dokumen kebijakan penanganan kerusakan lingkungan - Penanganan kasus perusakan lingkungan
SS.5	Persentase penyelesaian tugas lainnya	IKU.5 Persentase penyelesaian tugas lainnya Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi 2. Kunjungan Lapangan	100%					√	

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan									
SS.1	Terwujudnya efektifitas, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan	<p>IKU.1 Indeks Risiko Bencana (IRB) Nasional</p> <p>Tahapan Kegiatan :</p> <p>1. Rapat Koordinasi Penilaian Indeks Risiko Bencana (IRBI)</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Penguatan kebijakan dan kelembagaan</p> <p>b. Pengkajian risiko dan penanganan terpadu</p> <p>c. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik</p> <p>d. Penanganan tematik kawasan bencana</p>	< 144					√	Tersusunnya rekomendasi kebijakan mengenai Skor Rata-Rata Indeks Risiko Bencana (IRB) Nasional < 144
SS.2	Terwujudnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	<p>IKU.2 Persentase Tingkat Capaian Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca sebesar 29% pada tahun 2030</p> <p>Tahapan Kegiatan :</p> <p>1. Rapat Koordinasi Penyelesaian RPerpres NEK-NDC</p> <p>2. Rapat Koordinasi dengan seluruh sektor terkait</p> <p>3. Rapat Koordinasi per sektor terkait</p>	80%					√	Mendorong Capaian Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca tahun 2030 sebesar 29% dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia melalui sinkronisasi dan koordinasi hingga mencapai 80% dari target tahun 2030
SS.3	Terwujudnya target penurunan emisi	<p>IKU.3 Persentase Tingkat Penurunan Emisi dalam sektor Kehutanan dan Lahan 17,2% pada tahun 2030</p> <p>Tahapan Kegiatan :</p> <p>1. Rapat Koordinasi Penyelesaian RPerpres NEK-NDC</p> <p>2. Rapat Koordinasi sektor hutan dan lahan</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Kunjungan Lapangan</p>	80%					√	Mendukung Tingkat Penurunan Emisi dihitung hanya pada sektor kehutanan dan lahan sebesar 17,2% pada 2030 hingga mencapai 80% dari total target tahun 2030
SS.4	Peningkatan sistem informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	<p>IKU.4 Persentase Target Pembangunan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas sebesar 300 sistem pada tahun 2020</p> <p>Tahapan Kegiatan :</p> <p>1. Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi Perangkat Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami</p> <p>a. Kunjungan Lapangan</p>	80%					√	Mendukung Penguatan sistem peringatan dini bencana di 34 Provinsi yang berjumlah 300 sistem pada 2020 hingga mencapai 80% dari total target tahun 2020

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan										
SS.1	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	IKU. 1 Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang sesuai Kompetensi	90%						√	Bagian Administrasi Umum - Sub bagian Tata Usaha
		Tahapan Kegiatan : 1. Sosialisasi dan Penginputan Aplikasi Marves HR 2. Ceramah Pengembangan Karakter 3. Penugasan Pegawai mengikuti Bimbingan Teknis yang Menunjang Tupoksi Pegawai								
SS.2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	IKU. 2.1 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	> 65						√	Bagian Program - Sub Bagian Perencanaan - Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi
		Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Penyusunan Dokumen AKIP Semester 1 2. Penetapan Dokumen AKIP Akhir Tahun								
SS.2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	IKU. 2.2 Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	75						√	Bagian Program - Sub Bagian Perencanaan - Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Bagian Administrasi Umum - Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Pelaporan
		Tahapan Kegiatan : 1. Penyusunan SK Tim Pokja RB Deputy 2. Penyusunan dan Pelaksanaan Renaksi RB 80% 3. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) 4. Monev Pelaksanaan RB 5. Pengisian PMPRB 6. Evaluasi Tim Kemen PAN RB								
SS.3	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	IKU. 3 Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	95						√	Bagian Administrasi Umum - Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Pelaporan
		Tahapan Kegiatan : 1. Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan 2. Pemanfaatan Aplikasi Keuangan 3. Pelaksanaan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian								

SS.4	Terwujudnya tata kelola organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	IKU. 4.1 Persentase penyelesaian laporan yang tepat waktu	100%					√	Bagian Administrasi Umum - Sub Bagian Pelaporan	
		Tahapan Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kegiatan Periodik Bulanan 2. Penyusunan Laporan Kegiatan Periodik Tahunan								
		IKU. 4.2 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	100%						√	Bagian Program - Sub Bagian Perencanaan
		Tahapan Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 4. Penyusunan Dokumen RKAKL								
		IKU. 4.3 Persentase dokumen RB yang dapat disediakan tepat waktu	100%					√	Bagian Program - Sub Bagian Perencanaan - Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Bagian Administrasi Umum - Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Pelaporan	
		Tahapan Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renaksi RB Bulan April, Mei dan Juni 2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Triwulan III dan IV								
		IKU. 4.4 Jumlah layanan kesekretariatan yang terlaksana dengan baik	2 Layanan					√	Bagian Administrasi Umum - Sub Bagian Tata Usaha	
		Tahapan Kegiatan : 1. Terlaksananya Layanan Ketatausahaan 2. Terlaksananya Layanan Kedeputian								
SS.5	Terlaksananya koordinasi program dan anggaran serta pemantauan kegiatan yang optimal	IKU. 5.1 Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	4 Dokumen	1.331.113.000				√	Bagian Program - Sub Bagian Perencanaan	
		Tahapan Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Finalisasi: 1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 4. Penyusunan Dokumen RKAKL								
		IKU. 5.2 Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	5 Dokumen					√	Bagian Program - Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi	
		Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen AKIP 2. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja per Triwulan dan Akhir Tahun 2020 3. Rapat, Monitoring Kegiatan Dukungan Kegiatan Strategis Kedeputian								

SS.6	Terlaksananya layanan administrasi dan umum yang baik	IKU. 6.1 Jumlah dokumen pengelolaan ketatausahaan dan dukungan kesekretariatan yang diselesaikan tepat waktu	4 Dokumen	1.379.157.000				√	Bagian Administrasi Umum - Sub Bagian Tata Usaha
		Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Kegiatan Layanan Ketatausahaan 2. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Kegiatan Layanan Kedeputian 3. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Kegiatan Layanan Organisasi dan Rumah Tangga 4. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Kegiatan Layanan Penanganan COVID-19							
		IKU. 6.2 Jumlah laporan kegiatan dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	17 Dokumen						
Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan Periodik Bulanan (E Laporan) 2. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan Periodik Tahunan 3. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 3 dan 4 4. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pengembangan Aplikasi Keuangan dan Aplikasi SIMAS									
IKU. 6.3 Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diselesaikan tepat waktu	5 Dokumen				√	Bagian Program - Sub Bagian Perencanaan - Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Bagian Administrasi Umum - Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Pelaporan			
Tahapan Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renaksi RB Bulan April, Mei dan Juni 2. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Triwulan III dan IV									